# BAB II
# KEADAAN CHOSON DAN AWAL PERKEMBANGANNYA

## A. Pendirian Kerajaan Choson dan Tahap Awal Pertumbuhan.

Posisi geografi Semenanjung Korea yang strategis menyebabkan Korea dalam sepanjang sejarahnya, mempunyai arti penting dari sudut strategi. Hal ini karena, seperti halnya negara Israel di tengah kawasan Timur Tengah dan Singapura di tengah lautan Malaysia, semenanjung Korea terletak di tengah tiga negara besar, yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Bahkan pada akhir masa abad ke-19 Amerika juga mencoba memberikan pengaruhnya ke tanah Korea. Semenanjung Korea yang luasnya kira-kira sama dengan Inggris, terletak antara 33°, 06´ dan 43° lintang utara serta antara 124°, 11´ dan 131°, 52´ bujur timur. Panjang semenanjung Korea dari ujung utara ke ujung selatan kira-kira 1.000 km, yang kurang lebih sama dengan panjang Pulau Jawa dari ujung timur ke ujung barat, sedangkan lebarnya pada daerah tersempit adalah 216 km.[1]

Semenanjung Korea dipisahkan di sebelah utara oleh sungai Amnok (Yalu) dan Duman (Tumen). Di sebelah utara kedua sungai masing-masing terdapat daratan Cina dan perbatasan Cina-Rusia. Pelabuhan Angkatan Laut Rusia, Vladivostok, berada tidak jauh dari perbatasan Korea-Cina-Rusia tersebut. Kedua sungai Amnok dan Duman berasal dari gunung Baekdu, yang berarti gunung bertopi putih dan dianggap oleh rakyat Korea sebagai gunung suci. Gunung Baekdu itu merupakan gunung tertinggi di Semenanjung Korea, dengan

---

[1]Yang Seung-Yoon & Mohtar Mas'oed. *Politik Ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-Pokok Kepentingan dan Permasalahannya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 1.

tingginya yang mencapai 2.744 meter dari permukaan air laut. Berbeda dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia, dimana gunung-gunung yang ada merupakan satu gunung tersendiri dan terpisah dari gunung yang lain, sedangkan gunung-gunung yang ada di Korea merupakan suatu rangkaian pegunungan yang saling menyambung dan mengelilingi Semenanjung Korea. Gunung Baekdu merupakan salah satu bagian dari rangkaian pegunungan itu dan memiliki ketinggian yang paling tinggi di antara gunung-gunung yang lain.[2]

Korea mempunyai garis pantai yang banyak menjorok ke darat dengan panjang keseluruhannya mencapai lebih dari 17.000 km. Korea mempunyai sekitar 3.000 pulau besar maupun kecil yang berada di lepas pantai yang semuanya terdiri dari batu-batu, sedangkan ada 200 pulau yang cukup luas untuk didiami penduduk Korea. Kurang lebih 70% tanah di Korea terdiri dari pegunungan. Dari satu hektar pegunungan hanya dihasilkan 44 $m^3$ hasil hutan. Hasil ini sangat kecil bila dibandingkan dengan Indonesia yang setiap hektar hutannya menghasilkan 165 $m^3$. Korea bagian utara lebih banyak terdiri dari pegunungan daripada sawah dan ladang, sedangkan bagian selatan lebih banyak terdapat sawah dan ladang. Karena banyaknya pegunungan dan sempitnya semenanjung, sungai-sungai di Korea pada umumnya dangkal, pendek, dan deras.[3]

Sungai *Amnok* yang terdapat di ujung perbatasan Korea-Cina merupakan sungai terpanjang dengan panjang 790 km yang dihimpit oleh pegunungan. Dua

---

[2]*Ibid*., hlm. 2.

[3]*Ibid*., hlm. 2-3.

sungai yang panjangnya lebih dari 500 km terdapat di sebelah selatan yaitu Sungai *Nak-Dong* yang panjangnya 525 km dan Sungai *Han*[4] yang panjangnya 514 km mengalir dari belahan timur ke belahan barat melalui Seoul. Masa Kerajaan Choson Sungai *Han* mempunyai peran penting, yaitu membawa Korea memasuki zaman modern. Sungai *Han* sebagai penyangga kehidupan wilayah utama Korea telah memainkan peran utama di sepanjang sejarah Korea.[5]

Dokumen-dokumen asing seringkali menyebut Sungai *Han* sebagai sungai Seoul. *Donggungnyeojiseungnam* (penelitian terhadap Geografi Korea) yang disusun pada masa Raja Songjong (1464-1469) Kerajaan Choson, menuliskan Sungai *Han* sebagai berikut:

> "Dari sumbernya di mata air *Utongsu* di *Odae-san* di daerah Gang-neung, Sungai *Han* mengalir ke barat laut Chungju dan menyatu dengan *Anchangsu* (sekarang *Seom-gang*) …… menjadi *Gwangjin* (sekarang *Gwangnaru*), *Samjeondo* dan *Dumopo* (sekarang *Dumutgae*), kemudian mengalir ke selatan melewati Gyeongseong (sekarang Seoul) dan menjadi *Han-do*. Dari sana, sungai *Han* mengalir ke barat dan menjadi Sungai *Yongsan* dan Sungai *Seo* di daerah yang lebih ke barat. Sungai *Han* mengalir ke barat melewati Gyohagun dan menyatu dengan Sungai *Imjin*,

---

[4]Asal mula nama Sungai *Han* berasal dari kata Korea *Han-garam*. Kata *Han* hampir sama dengan kata kuno yang berarti mulia atau suci. Selama masa Kerajaan Choson, ritual-ritual keagamaan dilakukan untuk menyembah empat sungai suci atau sungai-sungai yang mengalir langsung ke laut. Ada satu sungai di masing-masing daerah mata angin: Sungai *Nak-Dong* (timur), Sungai *Daedong* (barat), Sungai *Yongheung* (utara), Sungai *Namhan* (bagian selatan Sungai *Han*). Yang Seung-Yoon, *Kebudayaan Korea Tanah dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), hlm. 3.

[5]Yang Seung-Yoon, *Seputar Kebudayaan Korea*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1995), hlm. 4.

menjadi Sungai *Jo* di sebelah utara Tongjinbu dan kemudian mengalir menuju ke laut."[6]

Korea memiliki empat musim yang berbeda satu sama lain, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Karena letak Semenanjung Korea yang condong ke arah daratan, suhu udara sepanjang musim dingin menjadi sangat dingin dan turun banyak salju, sedangkan pada musim panas sering diserang angin topan yang bersamaan dengan musim penghujan yang dimulai pada bulan Juni dan berakhir pada bulan Agustus. Catatan menunjukan bahwa selama musim penghujan, hujan yang turun rata-rata meliputi 50% dari seluruh hujan di setiap tahun[7]. Perbedaan panas dan dinginnya udara sangat besar. Suhu udara di tengah musim panas naik sampai 38º Celcius di bawah nol. Sementara itu suhu terdingin sepanjang musim dingin berada di bawah 0º Celcius[8].

Akhir periode Kerajaan Koryo adalah masa transisi menuju ke masyarakat yang modern, pada masa ini banyak pengaruh politik yang muncul untuk memulihkan ketertiban. Salah satunya muncul kelompok progresif yang mempelajari Konghuchu dan memiliki pengalaman yang luas dalam pemerintahan. Pada tahun 1392, Kerajaan Koryo mengalami kekacauan akibat kudeta dari kaum militer yang dipimpin oleh Yi Song-gye. Dalam suasana kacau dan genting menjelang runtuhnya Kerajaan Koryo, kaum ilmuwan maupun kaum

---

[6]Yang Seung-Yoon, *Kebudayaan Korea Tanah dan Lingkungan Hidup*, *loc.cit.*

[7]Yang Seung-Yoon, *Seputar Kebudayaan Korea*, *loc.cit.*

[8]Yang Seung-Yoon & Mohtar Mas'oed, *op.cit.,* hlm. 3-4.

militer mencari jalan untuk membangun kerajaan baru dan melakukan kebijakan pertahanan baru untuk meningkatkan kekuatan mereka di bidang ekonomi. Gerakan ini selanjutnya melahirkan sebuah kerajaan yang didukung oleh kaum sarjana kemudian diberi nama Kerajaan Choson[9], nama yang mencerminkan semangat tradisi Kerajaan Co-Choson. Kaum sarjana sipil yang dipimpin oleh Chong To-jon dan Cho Chun mengangkat Yi Song-gye sebagai raja pertama Kerajaan Choson.[10]

Kerajaan Choson yang dipimpin Yi Song-gye menetapkan Hanyang (sekarang Seoul) sebagai ibukota kerajaan. Kerajaan Choson menitikberatkan pada usaha menstabilkan kehidupan masyarakat dengan menetapkan beberapa kebijakan utamanya, diantaranya adalah mengembangkan politik Konghuchu, meningkatkan industri pertanian, dan kebijakan untuk bersikap pro terhadap Kerajaan Ming, Cina. Ilmu Konghuchu dijadikan sebagai dasar teori dalam memerintah kerajaan, pengembangan industri pertanian ditujukan untuk mendorong peningkatan pendapatan nasional serta menstabilkan kehidupan masyarakat, sedangkan kebijakan pro-Ming ditujukan untuk menciptakan keamanan nasional.[11]

---

[9]Lihat lampiran.

[10]Tim Pusat Studi Korea, *Sejarah Korea*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005), hlm. 32.

[11]Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2003), hlm. 66.

Proses pembaharuan struktur pemerintahan untuk dapat mendirikan kerajaan yang berlandaskan ilmu Konghuchu dimulai dari masa Raja Taejong, Sejong, Sejo, sampai Raja Songjong. Pada masa pemerintahan Raja Sejo mulai disusun hukum dasar, yaitu *'Kyongguk Daejon,'* oleh Choe Hang dan pada masa pemerintahan Raja Songjong hukum dasar itu ditetapkan sebagai hukum dasar Kerajaan Choson. Selain menetapkan hukum dasar, Kerajaan Choson juga berhasil memperluas wilayah Korea hingga mencapai luas Korea saat ini. Raja Sejong berhasil menguasai kembali bekas wilayah kerajaan-kerajaan Korea sebelumnya di sekitar Sungai Yalu dan Tumen melalui pembangunan empat *kun* dan enam *jin* setelah mengusir *Suku Nuzhen*[12] dari wilayah tersebut. Setelah menetapkan batas wilayahnya, Kerajaan Choson berusaha untuk mengembangkan negara secara seimbang melalui pemindahan penduduk bagian selatan ke bagian utara.[13]

Yi Song-gye menjadikan Changan (satu dari ibu kota di Cina kuno) sebagai model pembangunan ibu kota yang baru. Ia menaklukkan wilayah bagian barat laut Korea yang dihuni oleh bangsa Jurchen dan wilayah barat laut di utara Sungai Taedong, Sungai Yalu, Sungai Tumen dijadikan sebagai garis perbatasan Korea bagian utara. Yi Song-gye juga mengaku bahwa Kerajaan Choson adalah

---

[12]*Suku Nuzhen*: salah satu suku di Mancuria (Cina) yang melancarkan invasi ke Kerajaan Choson (Perang Horan), suku ini merupakan cikal bakal dari suku Manchu yang kemudian mendirikan Dinasti Qing kerajaan terakhir di Cina). Radio Korea International (KBS) dan National Institute for International Education Development (NIIED) Ministry of Education of Korea, *Sejarah Korea*, (Seoul: World Compugraphic Co., Ltd, 1995), hlm 110.

[13]Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati, *loc.cit.*

sebagai vasal Dinasti Ming Cina dan mengadakan hubungan baru dengan Jepang.[14] Selama masa pemerintahannya, Yi Song-gye melakukan pembaharuan secara besar-besaran yang menyebabkan jatuhnya keluarga-keluarga bangsawan yang berpengaruh yang meningkatkan gerakan anti Yi Song-gye. Keadaan ini mendorongnya untuk merebut tahta Kerajaan Koryo, dalam proses perebutan ini banyak anggota keluarga kerajaan termasuk kaum sarjana terbunuh.[15]

Pada abad ke-15 (sekitar tahun 1400-1418), tahap permulaan Kerajaan Choson yaitu sistem kehidupan sosial dan politik berdasarkan ilmu Konghuchu pada saat itu terbentuklah kaum *Yangban* (bangsawan), kaum pejabat sipil, dan pejabat militer. Kebijakan kaum *Yangban* mengutamakan bidang pertanian, industri, sosial, dan ekonomi. Dengan mulai bangkitnya kesadaran berbangsa, stabilnya sosial politik, dan meningkatnya kekuatan, Kerajaan Choson mampu mengembangkan kebudayaannya.

## B. Kehidupan Politik Kerajaan Choson

Pada masa awal Kerajaan Choson, sejumlah besar bangsawan yang mendukung kelahiran Choson berhasil memegang kekuatan politik. Namun kekuatan politik bangsawan tersebut secara bertahap semakin berkurang dan digantikan oleh kekuasaan raja. Hilangnya kekuasaan politik kaum bangsawan melahirkan sistem politik yang berpusat di tangan raja. Raja Taejong memusatkan

---

[14]Ririn Darini, *Sejarah Korea Sampai Dengan 1945*, (Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2008), hlm. 38.

[15]*Ibid.,* hlm. 37.

kekuasaan politik di tangan raja dengan melaksanakan pembaharuan sistem birokrasi dan penghapusan struktur pasukan pribadi kaum bangsawan sambil terus melaksanakan reformasi perekonomian dan peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah untuk memenuhi anggaran biaya kerajaan. Kebijakan reformasi Raja Taejong tersebut kemudian menjadi landasan kokoh bagi perkembangan kebudayaan bangsa dan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Raja Sejong, juga untuk memberikan sumbangan bagi terwujudnya kestabilan Kerajaan Choson serta pembentukan sistem pemerintahan yang sentralistik.[16]

Status sosial masyarakat Choson sebelum pre-modern banyak yang terangkat dikarenakan Konghuchu menjadi ideologi filosofi kerajaan. Sistem politik ini dijadikan landasan untuk melaksanakan ideologi politik Konghuchu yang diajarkan berdasarkan *Gyeonggukdaejon* (kode negara). *Uijeongbu,* yang terdiri dari jabatan *Yonguijong*, *Jwauijong*, dan *Uuijong*, dibentuk sebagai lembaga administrasi tertinggi Kerajaan Choson yang bertugas untuk menetapkan kebijakan kerajaan melalui kesepakatan trilateral sesuai dengan perintah raja yang saat ini menjadi kabinet utama, dan *Yukjo* membawahi enam kementerian yang bertugas untuk meninjau masalah politik secara keseluruhan. Terlepas dari itu *Saheonbu* bertugas untuk memeriksa kebijakan administrasi pemerintah dan sebagai pengambil keputusan. *Saganwon* mengkritisi kebijakan politik raja yang dijalankan secara bebas. *Hongmungwan* untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan kerajaan. Terlebih lagi saat dimana *Uijeongbu* menghadapi

[16]Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati, *op.cit.,* hlm. 66-67.

masalah kriminal dari para *Yangban*. *Hanseong-bu* yang mengatur perpolitikan pemerintah di ibukota.[17]

Untuk lembaga administrasi di tingkat daerah, Kerajaan Choson membagi wilayahnya menjadi delapan *do* (propinsi), dan setiap propinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang diutus langsung dari pusat. Di bawah propinsi terdapat lembaga pemerintah daerah, yaitu *Bu*, *Mok*, *Kun*, dan *Hyon* yang masing-masing lembaga dipimpin oleh *Busa, Moksa, Kunsu,* dan *Hyonyong.*[18] Selama masa Kerajaan Choson, para petani diwajibkan untuk menjalankan wajib militer. Setiap laki-laki dari kalangan biasa yang berumur antara 16-60 tahun memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pekerjaan pemerintah dan terdaftar untuk wajib militer. Mereka yang tidak menjalankan kegiatan militer disebut *bongjok* dengan tuntutan menyediakan bantuan dalam bidang keuangan untuk mendukung kegiatan wajib militer. Tentara dibagi menjadi tentara pusat (lima bagian kecil) dan tentara daerah (tentara dan angkatan laut). Tentara daerah setempat memimpin dalam setiap keputusan tiap daerah. Kemudian Raja Sejo memulai perbaikan sistem militer dengan tujuan utama untuk mengubah poin-poin penting strategi pertahanan, mendukung melokalisir sistem pertahanan, mempekerjakan *Bonsuje* (Mercusuar/menara suar) dan *Yeokmaje* (kuda sebagai alat pembawa

---

[17]Shin Hyong Sik, *An Easy Guide to Korean History*, (Seoul: The Association for Overseas Korean Education Development Press, 2010), hlm. 106.

[18]*Ibid.,* hlm. 107.

pesan) sebagai jaringan komunikasi. Setelah abad ke-16 sistem wajib militer runtuh dan diganti dengan sistem pendaftaran wajib militer.[19]

Sistem militer adalah penyebab ketidakpuasan para petani, karena petani diharuskan membayar bahan pakaian untuk dinas militer. Di sisi lain petani-petani kaya membayar untuk mendapat pengecualian dari kewajiban militer. Hal ini menyebabkan pendanaan militer tidak tercukupi. Para pejabat juga memaksa orang untuk membayar pajak militer tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi bahkan bagi keluarga mereka yang sudah meninggal (*Paekkoljingpo*) dan yang melarikan diri, untuk kerabat (*Chokching*), dan tetangga (*Injing*). Mereka akan memaksakan pajak pada orang-orang yang berumur dibawah 16 tahun (*Hwangguch'omjong*), dan lainnya banyak yang melarikan diri. Sebagian besar petani harus membayar tidak hanya setengah dari pendapatan mereka untuk pemilik tanah pertanian, tetapi juga untuk segala macam pajak bagi para pejabat. Pada akhirnya karena ketidakmampuan membayar pajak ini, banyak dari mereka yang melarikan diri dari rumah-rumah majikan mereka.[20]

Pada masa akhir Kerajaan Choson muncul reformasi hukum *Kyunyok* yang membiarkan setiap orang untuk membayar 1 *pil* (ukuran kain) untuk mengurangi pembayaran dan membantu menghemat uang negara sekitar 800.000 *nyang* (mata uang Won Korea zaman dulu). Pada dasarnya kebijakan ini masih sama dengan kebijakan sebelumnya. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki kewajiban

---

[19]*Ibid.,* hlm. 109.

[20]Lee Chang-Ki, *The Early Revival Movement In Korea (1903-1907): A Historical and Systematic Study*, (Zoetermeer: Boekencentrum, 2003), hlm. 36-37.

militer masih melarikan diri dari rumah mereka dan orang-orang yang ditinggalkan harus menanggung beban mereka dua atau tiga kali lipat. Pada akhirnya orang-orang yang tidak bisa menanggung beban ini mulai melakukan kerusuhan.[21]

Perpecahan terjadi di Kerajaan Choson ketika Yi Song-gye turun tahta dan mengumumkan penggantinya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan putra-putra raja yang lain sehingga menimbulkan pemberontakan dan pembunuhan terhadap putra mahkota. Peristiwa ini membuat Yi Song-gye terguncang dan kemudian turun tahta pada tahun 1398 dan mengasingkan diri ke biara. Setelah Yi Song-gye turun tahta kemudian digantikan oleh Raja Chongjong yang dalam masa pemerintahannya memindahkan ibukota kerajaan dari Seoul ke Kaegyong. Raja Chongjong kemudian menghadapi permusuhan dari saudara-saudaranya hingga akhirnya turun tahta. Ia kemudian digantikan oleh Raja Taejong yang dikenal sebagai raja yang cakap dan bijaksana. Semasa pemerintahannya ibukota kerajaan dikembalikan lagi ke Seoul.

Selama masa pemerintahannya, Raja Taejong memperkuat otoritas monarki, memperbaiki struktur pemerintahan, memberlakukan sistem pendaftaran bagi para biksu dan melarang pembangunan biara-biara baru. Akibatnya hanya terdapat 242 biara di seluruh wilayah Kerajaan Choson. Selain itu Taejong juga menyita tanah milik para pejabat yang melakukan korupsi dan membebaskan semua budak yang mereka miliki. Kemudian Raja Taejong turun tahta dan

---

[21] *Ibid.*, hlm. 37.

menyerahkannya kepada anaknya Sejong yang saat itu berusia dua puluh satu tahun.

Sekitar tahun 1498-1545 terjadi serangkaian tragedi berdarah yang disebut *sahwa* atau pembunuhan para ahli ilmu pengetahuan. Peristiwa ini mengakibatkan situasi politik menjadi kacau yang kemudian menjadi salah satu faktor runtuhnya Kerajaan Choson. Pada masa itu juga banyak ahli Konghuchu terkemuka yang menjadi korban. Pada abad ke-16 para ahli ilmu pengetahuan dan ahli Konghuchu mulai memperoleh kembali kekuatannya. Di sisi lain muncul pula perselisihan-perselisihan faksional yang terus terjadi di pemerintahan. Munculnya perbedaan pendapat terhadap gagasan politik mengakibatkan lahirnya kelompok politik yang saling memperebutkan kekuasaan politik yang semakin mendorong terjadinya perpecahan sosial.[22]

Pada abad ke-18, Raja Yongjo dan Raja Chongjo berhasil menstabilkan keadaan sosial politik kerajaan. Memasuki abad ke-19 Kerajaan Choson mengalami kekacauan akibat pergantian kekuasaan ke tangan permaisuri. Kemiskinan dan kerusuhan yang merajalela mendorong timbulnya pemberontakan di berbagai daerah. Menghadapi situasi dan keadaan sosial yang kacau, pemerintah membuat serangkaian usaha untuk mengatasi keadaan tersebut. Pada masa pemerintahan Raja Sonjo (1567-1608) menyarankan pembaharuan kebijakan politik pemerintah.[23] Raja Yongjo (1724-1776) dan Raja Chongjo (1776-1800) menetapkan *Tangpyong-chaek* (kebijakan keharmonisan) untuk mengatasi hal-hal

---

[22]Ririn Darini, *op.cit.,* hlm. 41.

[23]Tim Pusat Studi Korea, *op.cit.,* hlm. 47.

negatif yang muncul dari politik partai. *Tangpyong-chaek* meliputi penyelenggaraan pertemuan sebagai wadah penyampaian pendapat antara pemimpin yang bertikai, pengangkatan pejabat tanpa mempedulikan asal partai politiknya, dan pendirian monumen *Tangpyong-chaek* di depan pintu gerbang *Sung-kyun-kwan* (Akademi Nasional Konfusius) sebagai monumen peringatan terhadap penetapan kebijakan tersebut.[24]

Raja Yongjo selama masa pemerintahannya berusaha menyeimbangkan situasi politik dan mengurangi perselisihan faksional serta memperbaiki kondisi ekonomi. Ia juga mempekerjakan sarjana yang cakap tanpa memandang afiliasi faksionalnya dan mengatasi krisis yang disebabkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi.[25] Yongjo juga menutup sekitar 300 *seowon* (sekolah pribadi), membuat hukum *Kyunyok* (peraturan pemungutan pajak) untuk memperbaiki hal-hal negatif dalam bidang militer. Yongjo juga menghidupkan kembali sistem *Shinmungo* yang pernah diberlakukan pada masa pemerintahan Raja Taejong yaitu dengan meletakkan sebuah beduk besar di luar pintu gerbang kerajaan. Setiap orang yang merasa tidak memperoleh keputusan yang adil dalam suatu proses hukum di pengadilan, bisa pergi ke istana dan mengadukan masalahnya dengan terlebih dahulu memukul beduk itu, selain digunakan untuk sistem *Sinmungo*, beduk itu juga digunakan sebagai alat untuk memberikan tanda bahaya apabila ada pemberontakan.[26] Raja Chongjo melanjutkan kebijakan di

---

[24]*Ibid.*

[25]Ririn Darini, *loc.cit.*

[26]Tim Pusat Studi Korea, *op.cit.,* hlm. 47-48.

bidang militer yang dikembangkan oleh Raja Yongjo yaitu membentuk *Changyong-yong* (Pasukan Pengawal Raja) dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan militer kerajaan[27].

Setelah melalui invasi yang dilakukan oleh Jepang dan Dinasti Qing, pemerintahan Choson meluncurkan serangkaian reformasi untuk membangun kembali kerajaan yang hancur. Secara politis *Uijeongbu* digantikan oleh *Bibyeonsa* yang berfungsi sebagai institusi tertinggi urusan militer dan administratif hingga tahun 1865. Di badan militer sistem 5 *wi* (perintah) konfensional ini tidak efektif dan sistem ini dihapuskan kemudian didirikan sistem 5 *Gunyeong* (tentara yang ditempatkan di dalam kota/daerah). Keistimewaan dari reformasi militer ini adalah penggantian perekrutan dengan wajib militer yang diterapkan atau wajib diikuti setiap *Yangban*, budak, maupun rakyat jelata. Selain itu juga didirikan sistem 5 *Gunyeong* termasuk *Hulnyeon Dogam* (pelatihan militer pemerintah), *Geumwiyeong* (pengawal istana kerajaan), dan *Eoyeongcheong* (pengawal ibukota).[28]

Pemerintah Kerajaan Choson menghadapi tantangan dari masyarakat yang menuntut reformasi besar-besaran. Untuk memenuhi tuntutan tersebut Kerajaan Choson menerapkan langkah-langkah pembaharuan yang terdiri dari 208 buah kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Di dalam pembaharuan sistem politik, Kerajaan Choson memisahkan antara kepentingan kerajaan dan kepentingan

---

[27]*Ibid.*

[28]Shin Hyong Sik*, op.cit.,* hlm. 122.

pemerintah, meniadakan ujian pegawai sipil, memisahkan hak yudikatif, dan memperbaharui sistem pemerintahan daerah.

Akan tetapi muncul tantangan keras dari imperialis Jepang atas kebijakan tersebut. Untuk mematahkan tantangan itu, pada tahun 1895 imperialis Jepang melakukan pembunuhan yang dibantu oleh anak buah mereka terhadap permaisuri Myongsong (permaisuri Min). Akibat campur tangan imperialis Jepang dalam Kerajaan Choson, Raja Kojong untuk sementara mengungsi ke Konsulat Jenderal Rusia. Raja Kojong juga melancarkan kebijakan anti Jepang dengan mengeluarkan kebijakan Pro-Rusia. Namun kebijakan tersebut pada akhirnya justru merusak kewibawaan dan kedaulatan negara.

Situasi ini membangkitkan semangat kemandirian di kalangan Kerajaan Choson dengan terbentuknya Komite Kemerdekaan. Aktifitas Komite Kemerdekaan memberikan pengaruh besar, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat. Mereka menuntut peningkatan hak rakyat khususnya hak kelangsungan hidup, hak bebas, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Untuk meredam aksi yang dilancarkan Komite Kemerdekaan, pemerintah Kerajaan Choson memenuhi tuntutan tersebut. Namun, tidak lama kemudian komite itu dibubarkan. Meskipun demikian, semangat dan kesadaran dari gerakan Komite Kemerdekaan telah menjadi landasan kokoh ideologi gerakan anti Jepang.

## C. Kehidupan Sosial Ekonomi Kerajaan Choson

*Yangban* atau sering disebut juga *sadaebu*, berasal dari istilah Cina *shidafu* yang berarti sarjana atau pejabat. Pada sensus yang dilakukan abad ke-17 dan abad ke-18 menunjukkan bahwa hampir seluruh *Yangban* memiliki banyak budak dari kalangan rakyat jelata. Bagi para *Yangban* kekayaan sangat berperan penting yaitu sebagai pembeda dengan rakyat biasa. Status *Yangban* biasanya ditentukan berdasarkan keturunan, secara umum garis keturunan sangat diperlukan untuk menjadi pejabat guna mempertahankan status sosial. Pada perkembangannya golongan *Yangban* benar-benar mendominasi kehidupan di Choson. Banyak dari mereka yang menjabat sebagai pemimpin birokrasi, pemimpin moral, dan budaya di masyarakat. Di daerah pedesaan *Yangban* menjabat sebagai elit lokal yang bertugas memberikan ceramah atau khotbah bagi masyarakat setempat. Dari lingkungan tempat tinggal, golongan *Yangban* dipisahkan dengan rakyat jelata.[29]

Pada masa kerajaan Choson, kaum *Yangban* menjadi golongan pemimpin. Nama asli *Yangban* diambil dari sebutan *Mun'gwan* (pejabat sipil) dan *Mugwan* (pejabat militer) yang wewenangnya sebagai lapisan masyarakat khusus semakin meningkat. Mereka memegang jabatan sebagai birokrat setelah lulus ujian kerajaan, tetapi anak laki-laki dari birokrat tinggi mempunyai hak istimewa untuk menjadi pejabat tanpa melalui ujian apa pun. Di antara kaum *Yangban*, jabatan *Mun'gwan* lebih diutamakan daripada jabatan *Mugwan*.[30]

---

[29]Michael J. Seth, *A History of Korea From Antiquity to the Present*, (Plymouth UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2011), hlm. 165-166.

[30]Tim Pusat Studi Korea, *op.cit.,* hlm. 34.

Selain itu anak haram dari kaum bangsawan tetap dibatasi untuk memperoleh posisi tetap dalam masyarakat. Kaum bangsawan Kerajaan Choson ini tidak ikut berperan dalam kegiatan produksi. Satu-satunya tugas mereka adalah hanya melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperdalam pengetahuannya mengenai ilmu Konghuchu dan satu-satunya profesi yang dapat mereka lakukan adalah menjadi pegawai negeri. Dengan tugas dan profesi yang sangat terbatas, kelas *Yangban* menjadi sangat elitis. Ditambah lagi dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah, sifat elitis kaum *Yangban* menjadi semakin kuat. Untuk mempertahankan sifat elitis tersebut, mereka melakukan beberapa usaha agar jumlah anggota kelas *Yangban* tidak semakin bertambah banyak.[31]

Usaha-usaha tersebut diantaranya adalah bertempat tinggal di wilayah Seoul yang terpisah dengan wilayah tempat tinggal masyarakat umum dan melarang anggota *Yangban* menikah dengan masyarakat umum. Anggota *Yangban* hanya boleh menikah dengan sesama anggota *Yangban*. Di dalam kelas *Yangban* sendiri terjadi diskriminasi. Golongan bangsawan sipil lebih berkuasa bila dibandingkan dengan golongan bangsawan militer dan anak yang terlahir dari istri kedua dan seterusnya tidak memiliki banyak kesempatan dan kemudahan untuk mengikuti ujian negara dan bekerja di kantor-kantor pemerintah.[32]

Awal permulaan Kerajaan Choson, sebagian besar masyarakat terbagi menjadi dua kelas sosial: *yangin* (kelas yang lahir dari berbagai macam status: orang biasa) dan *Cheonim* (kelas bawah). Akan tetapi kelas sosial terbagi lagi

---

[31]Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati, *op.cit.,* hlm. 68.

[32]*Ibid*.

menjadi empat kelas: *Yangban* (bangsawan), *Jungin* (kelas menengah), *Sangmin* (rakyat biasa), dan *Cheonmin* (kelas bawah/rakyat jelata). Dari kelas *Yangban* (bangsawan) mereka dapat memilih menjabat di departemen negara yang mereka inginkan sebagai pegawai tetap pemerintah. Para *Yangban* juga memonopoli bidang akademik dan bidang pendidikan. Karena mempunyai kewenangan dalam banyak bidang, para *Yangban* ini menyalahgunakannya dengan mengumpulkan harta kekayaan secara besar-besaran, mereka juga memiliki hak istimewa karena dibebaskan dari pajak dan tugas-tugas sebagai pegawai pemerintahan.[33]

Golongan yang berkuasa selanjutnya adalah *Jungin* (kelas menengah), dimana kebanyakan *Jungin* terdiri dari spesialisasi teknik, juru bahasa (penerjemah), tabib, ahli ilmu perbintangan, ahli ilmu seni, dan yang terakhir adalah sebagai pegawai pemerintah. Selanjutnya kelas *Sangmin* (rakyat biasa) terdiri dari petani, pedagang, dan ahli yang mempunyai keterampilan di bidang teknik. Kelas *yangin* dikenakan kewajiban untuk membayar pajak, dan mengerjakan tugas-ugas dalam wajib militer. Kelas *Cheonmin* (kelas bawah/rakyat jelata) terdiri dari budak yang sering diperjualbelikan.[34]

Pada periode awal terdapat sekitar 350.000 budak, tetapi kemudian pada abad ke-17 yaitu setelah invasi Jepang dan Manchu jumlahnya menurun menjadi 200.000. Banyak budak yang memperoleh kebebasannya dengan membayar pajak untuk mengganti layanan kerja atau dengan mengabdi pada kemiliteran. Sebagian mendapat kebebasan dari pemiliknya, atau melarikan diri dan menjadi bandit.

---

[33]Shin Hyong Sik*, op.cit.,* hlm. 107.

[34]*Ibid.*

Pada tahun 1810 banyak budak milik negara yang dibebaskan. Pembebasan budak ini turut menyebabkan munculnya kelas pengrajin dan meningkatnya industri kerajinan.[35]

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak individu yang terlahir di kelas *Yangban* gagal mempertahankan status kebangsawanannya. Hal itu sering diakibatkan karena *Yangban* yang tinggal di daerah pedesaan dari generasi kegenerasi selalu gagal dalam ujian masuk pegawai pemerintah. Kemerosotan perekonomian keluarga juga menyebabkan sebagian *Yangban* tidak dapat mengikuti gaya hidup kelas *Yangban* sehingga lama kelamaan mereka tersingkir dari kelasnya. *Yangban* yang tidak dapat mempertahankan statusnya ini kemudian beralih menjadi bangsawan lokal dan petani kecil, dan mereka sering dipanggil dengan sebutan *Chanban* seiring dengan semakin bertambah banyaknya jumlah mereka. Dengan demikian, peran *Yangban* dalam struktur sosial maupun struktur pemerintahan Kerajaan Choson semakin melemah.[36]

Selama masa kejayaannya golongan *Yangban* menikmati lebih banyak hak untuk menikmati politik, akademis, dan ekonomi. Jumlah *Yangban* yang meningkat berkaitan dengan jumlah harta dan posisi di pemerintah, pengabdian, dan hak eksklusif untuk mengikuti ujian pegawai. Namun pendapatan nasional pemerintah mulai menurun karena *Yangban* dibebaskan dari pajak dan tugas militer. Akhirnya mulai terjadi konflik dan konfrontasi antara para *Yangban*, dan hal ini terjadi untuk melindungi kapentingan pribadi mereka masing-masing.

---

[35]Ririn Darini, *op.cit.,* hlm. 45.

[36]Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati, *op.cit.,* hlm. 68-69.

Secara politis, golongan *Yangban* menduduki posisi tertinggi dalam semua pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, mereka memiliki pertanian dan tanah yang luas. Di bidang Sosial, para *Yangban* mendirikan sebuah tempat khusus untuk sesama kaum *Yangban* yang bangunannya dibuat berhadapan satu sama lain. Selain itu perbedaan pandangan yang sangat besar di antara sekolah, kaum (suku), dan daerah menyebabkan perselisihan antara anggota *Yangban*. Selain itu para anggota *Yangban* berusaha untuk melindungi kepentingan dan hak-hak mereka dengan mendirikan *hyangyak* (peraturan desa) dan *seowon* (sekolah pribadi).[37]

Selama menjabat di pemerintahan para *Yangban* kurang memperhatikan masyarakat Choson, terutama golongan menengah kebawah. Pedagang dan pengrajin diabaikan hal ini berakibat sebagian besar orang kebanyakan melakukan kegiatan perdagangan secara individu. Dengan alasan kurang berkembang, selain itu kegiatan perdagangan dibatasi hal ini berkaitan dengan pembatasan dalam peredaran mata uang dan kekurangan alat transportasi. Di jantung kota Seoul terdapat pasar umum yang disebut *yukeuijeon*. Pasar ini sering dikunjungi terutama oleh para *Yangban* karena menjual sutra, kertas, dan produk perlengkapan penangkapan ikan. Di kota-kota dan daerah pedesaan, pasar lokal dibuka setiap lima hari untuk memperdagangkan barang-barang dagangan mereka. Pedagang yang berpartisipasi dalam pasar tersebut disebut *bobusang*, sebagai penyalur barang dagangan yang dioperasikan dengan jaringan nasional.[38]

---

[37]Shin Hyong Sik*, op. cit.,* hlm 113.

[38]*Ibid.*

Periode berakhirnya Kerajaan Choson ditandai dengan munculnya pemberontakan. Pemberontakan ini terjadi pada kondisi yang kompleks yaitu di mana jumlah orang yang terlibat dalam pemberontakan sangat banyak. Selain itu kemiskinan dan kelaparan disebabkan tidak hanya oleh bencana alam, tetapi juga oleh eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan oleh kelas *Yangban* yang lebih tinggi dalam sistem sosial yang tidak seimbang mendorong mereka untuk memberontak. Korupsi para pejabat pemerintah juga menjadi alasan kuat mereka memberontak. Pemberontakan ini berlanjut hingga abad ke-19. Pada tahun 1811-1812 muncul poemberontakan yang terjadi di *Kyong Nae-hong* Pyongyang dan propinsi *Hwanhae*. Para pemberontak ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat mulai dari para pelajar, orang kaya, budak, dan petani. Pemberontakan dipimpin oleh orang-orang kaya dari kelas atas dan berpendidikan.[39]

Menjelang masa akhir Kerajaan Choson, kaum petani berkesempatan untuk meningkatkan status sosialnya menjadi kaum *Yangban* apabila mereka memberikan sumbangan uang untuk membiayai perang atau berperan dalam pengembangan perekonomian kerajaan. Kaum petani miskin yang bekerja pada pemilik tanah yang luas mengalami penurunan status sosial menjadi golongan budak atau buruh. Saat itu status sosial adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Dengan uang yang ada, setiap orang berusaha untuk membebaskan diri dari status sosial rendah yang dimiliki sebelumnya. Pemerintah

[39] Lee Chang-Ki, *op.cit.,* hlm. 37.

kerajaan membiarkan hal tersebut dengan tujuan untuk menambah uang kas kerajaan.[40]

Setelah invasi oleh Jepang dan Dinasti Qing, kondisi keuangan Choson sangat miskin. Pemerintah kemudian memperkenalkan *Daedongbeop* (Undang-undang Pajak Tanah: 1608-1708) yang berisi tentang penetapan pembayaran pajak untuk semua beras. Butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk melanjutkan rencana baru secara merata ke seluruh kerajaan, dan meskipun pendapatan nasional meningkat, beban para petani juga menjadi lebih berat. Muncul penagih pajak atau lebih dikenal dengan *Gongin*. Tahun 1750 muncul sistem *Gyunnyeokbeop* yang memungkinkan orang membayar pajak dengan pakaian sebagai pengganti untuk disumbangkan ke kegiatan militer. Namun reformasi ini malah menimbulkan korupsi dan berbagai akibat, antara lain meningkatnya beban para petani yang pada akhirnya mengarah kepada pemberontakan petani.[41]

Perubahan sosial dan ekonomi Choson juga memicu perubahan dalam sistem kelas sosial. Perubahan yang paling mencolok adalah jumlah *Yangban* yang relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan rakyat jelata dan jumlah budak atau kelas bawah yang turun drastis. Dalam situasi sosial yang seperti itu kelas *Jungin* juga membuat permohonan yang memungkinkan mereka menempati posisi tinggi dalam pemerintahan. Perubahan dalam sistem sosial ini juga membuat beberapa rakyat jelata bisa berubah menjadi golongan *Yangban* dengan cara membeli posisi mereka dalam pemerintahan. Hal ini juga membuat

---

[40]Tim Pusat Studi Korea, *op.cit.,* hlm. 51.

[41]Shin Hyong Sik, *op.cit.,* hlm. 123.

perubahan sosial yang tidak lagi berdasarkan sistem kelas, kesadaran petani juga meningkat secara signifikan.[42]

Selama akhir periode Kerajaan Choson, masyarakat Korea berkembang menjadi masyarakat dengan ekonomi kapitalis. Hal ini untuk menghasilkan masyarakat yang lebih egaliter. Meskipun ada ketidakstabilan dan kerusuhan tetapi bidang ekonomi membaik dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, produksi dan perdagangan. Sebelum modernisasi masyarakat Korea, hampir seluruh Korea menghasilkan hasil pertanian, karena petani merupakan populasi terbesar dari penduduk Korea, dan semua hasil pertanian untuk konsumsi. Selama akhir abad ke-19, Korea memproduksi lebih banyak sereal daripada sebelumnya, hal ini dikarenakan orang Korea telah menderita kekurangan bahan pangan dalam waktu yang lama. Bahkan sebelum abad ke-19 Korea banyak mengalami perang yang membuat banyak orang meninggal karena kelaparan. Pada periode ini ada laporan 3.600 mayat dari korban kelaparan, dimakamkan di Seoul. Setelah perang dan kelaparan pengadilan Kerajaan Korea bekerja sama dengan masyarakat Korea untuk memproduksi lebih banyak padi.[43]

Pada masa akhir Kerajaan Choson, spesies padi baru dikembangkan atau diperkenalkan untuk membantu meningkatkan hasil. Adalah *patoryo* padi yang tidak hanya mampu bertahan terhadap kekeringan, tetapi juga bisa dipanen lebih awal. Peningkatan teknologi juga membantu dalam meningkatkan produksi. Ada dua metode yang digunakan untuk pertumbuhan padi, yang pertama *i-yangpop*

---

[42]*Ibid.,* hlm. 128-129.

[43]Lee Chang-Ki, *op.cit.*, hlm. 31-32.

metode penyambungan tanaman muda dari penyemaian, dan *konpabob* atau *chikpabop* yaitu metode menabur langsung benih pada tanah pertanian. Selama abad ke-17 metode *i-yangbop* menjadi metode yang dipakai oleh para petani yang membuat hasil panen padi sukses[44]. Pada masa ini kualitas pupuk juga diperbaiki yang membawa akibat peningkatan jumlah produksi beras. Petani telah menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk untuk waktu yang lama, namun petani mulai memperbaharui pupuk yaitu dengan mencampurnya dengan abu. Campuran ini dianggap lebih baik dan jauh lebih penting daripada sebelumnya[45].

Selain itu konsumsi padi oleh orang Korea selama akhir Kerajaan Choson meningkat. Pejabat tinggi kerajaan melapor dan mengeluh kepada raja, orang-orang tidak suka makan jewawut (semacam tumbuhan padi-padian), orang miskin bahkan tidak mau makan jewawut, mereka hanya menyukai padi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi mulai membaik. Selain itu pengenalan ubi jalar dari Jepang dan kentang dari Cina selama periode ini membantu memperbaiki kondisi makanan. Pengenalan kubis Cina yang jauh lebih besar daripada kubis Korea membuat orang-orang Korea bisa membuat acar kubis kimchi dengan paprika merah, sebelumnya yang mereka makan adalah kimchi yang terbuat dari lobak putih.[46]

Seperti kerajaan-kerajaan Korea sebelumnya, Kerajaan Choson menjadikan bidang pertanian sebagai prioritas utama dalam bidang ekonomi.

---

[44]*Ibid.,* hlm. 32-33.

[45]*Ibid.,* hlm. 33.

[46]*Ibid*.

Kerajaan Choson berusaha sedapat mungkin untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya melalui pembukaan tanah pertanian baru, pembangunan sarana irigasi, pembaharuan teknologi pertanian yang digunakan, dan juga mengaktifkan kembali kegiatan pemeliharaan ulat sutra. Dengan usaha itu jumlah tanah yang digunakan serta produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan kerajaan dan mewujudkan stabilitas hidup para petani.[47]

Kerajaan Choson juga menetapkan sistem *Kwajon* sebagai kerangka dasar pelaksanaan peraturan pertahanan. Sesuai dengan sistem tersebut, kaum birokrat, termasuk pensiunan birokrat, mendapat tanah dengan luas tertentu sesuai dengan jabatan masing-masing dan tanah itu dapat diwariskan kepada keturunannya. Akan tetapi pada tahun 1466 saat memasuki masa pemerintahan Raja Sejo, kerajaan menghapus sistem *Kwajon* dan menggantinya dengan sistem *Jikjon*. Dalam sistem *Jikjon* kerajaan memberikan tanah sebagai upah kepada birokrat yang masih bertugas. Sistem *Jikjon* ini tidak bertahan lama dan akhirnya dihapus pada tahun 1556. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah tidak lagi memberikan tanah sebagai upah kepada para pegawainya.[48]

Dalam sistem pertanahan Kerajaan Choson ditetapkan berbagai macam klasifikasi tanah, antara lain tanah pribadi kaum pejabat pemerintah, tanah milik kerajaan, tanah milik instansi pemerintah dan tanah pribadi kaum petani. Lembaga-lembaga seperti militer, sekolah dan biara juga mendapatkan jatah tanah

---

[47]Yang Seung Yoon dan Nur Aini Setiawati, *op.cit.,* hlm. 69.

[48]*Ibid.,* hlm. 69.

dari pemerintah sebagai tempat untuk menjalankan kegiatannya masing-masing. Dengan sistem pembagian klasifikasi tanah seperti itu, kaum petani Kerajaan Choson terbagi dalam dua golongan, yaitu petani yang memiliki tanah sendiri dan petani yang meminjam tanah dari para pemilik tanah. Kaum petani yang meminjam tanah dari para pemilik tanah harus menyerahkan separuh hasil panennya kepada para pemilik tanah sebagai pembayaran sewa tanah tersebut. Seluruh petani memiliki kewajiban untuk membayar beban khusus, misalnya pajak, sumbangan berbagai barang ekonomi dan memberikan jasa tenaga kerja kepada kerajaan. Petani harus menyerahkan bahan pangan serta barang khas produksi setempat sebagai pajak penggunaan tanah.[49]

Kerajaan Choson juga berupaya memulihkan kembali kehidupan pertanian dan menstabilkan kehidupan masyarakat yang hancur akibat dua kali serangan bangsa asing. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain mengukur kembali luas tanah pertanian, memperbaiki dokumen tanah, membuka tanah baru, dan membangun sejumlah besar sarana *ongje* (Manajemen Pertanian), dan *Inwon Kyongje-chi* (Kumpulan Lengkap Usaha-Usaha Pertanian). Bersamaan dengan peningkatan taraf hidup kaum petani, masyarakat petani mulai membentuk organisasi gotong royong, seperti *kye* (ditetapkan berdasarkan sistem kekerabatan) dan *ture* (sistem pengelolaan tanah borongan yang dikerjakan bergilir), untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang pertanian. Industri kerajinan tangan pada awal Kerajaan Choson dikontrol langsung oleh pemerintah, tetapi lama kelamaan industri ini ditangani sendiri oleh masyarakat luas. Menjelang

---

[49]*Ibid.,* hlm. 70.

masa akhir kerajaan Choson, para pengrajin dapat memproduksi dan menjual barang-barang sendiri secara bebas. Hasil produksi mereka antara lain kertas, keramik, barang-barang kuningan, balok cetak, senjata, dan alat pertanian.[50]

Industri pertanian Kerajaan Choson berkembang aktif berkat adanya kebijaksanaan terpadu berlandaskan semangat swasembada, namun peningkatan kegiatan pertanian tidak diikuti oleh perkembangan kegiatan perdagangan dan industri kerajinan tangan, kedua kegiatan tersebut tidak begitu menunjukan banyak perkembangan bila dibandingkan dengan industri pertanian. Selain majunya industri pertanian karena adanya kebijakan swasembada, Sungai *Han* juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi Korea.

Saat pendiri Kerajaan Choson Yi Song-gye, harus memutuskan daerah mana yang akan dijadikan ibukota kerajaan, Sungai *Han* menjadi faktor kunci dipilihnya Seoul. Dalam pembahasan mengenai lokasi Sungai *Han* yang tercatat dalam *Chosonwangjosillok* (Buku Tahunan Raja-Raja Choson), kota Seoul digambarkan sebagai pusat strategis dunia yang cocok untuk jalur transportasi berkat kedekatannya dengan Sungai *Han*. Meskipun sejumlah jalur perairan yang cukup besar seperti Sungai *Han* menjadi penghalang utama transportasi darat, namun dampak negatif itu digantikan oleh nilai pentingnya sebagai jalur transportasi perairan.[51]

---

[50]Tim Pusat Studi Korea, *op. cit.,* hlm 49-50.

[51]Yang Seung-Yoon, *Kebudayaan Korea Tanah dan Lingkungan Hidup*, *loc.cit.*

Sejak berdirinya Kerajaan Choson pada tahun 1392, Sungai *Han* menjalankan fungsi penting sebagai jalur transportasi utama yang melayani ibukota. Dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Tanah (Daedongbeop) di masa akhir Kerajaan Choson yang mewajibkan pembayaran pajak dengan barang (khususnya beras) daripada uang, arti ekonomis Sungai *Han* menjadi lebih penting karena transportasi barang di sepanjang sungai menjadi meningkat drastis, pedagang yang beroperasi di sepanjang tepi sungai kemudian memegang kontrol terhadap pembagian tempat atas kegiatan ekonomi di tepi Sungai *Han*.[52]

Selain sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, Sungai *Han* juga berfungsi sebagai pintu masuk utama yang strategis bagi bangsa asing yang ingin memasuki Korea. Pada tahun 1888, kapal uap Prancis mulai beroperasi di sepanjang Sungai *Han*, dan dua tahun kemudian kapal-kapal Jerman dan Amerika Serikat juga mulai bermunculan di sepanajang sungai. Gandum dan bahan-bahan makanan, termasuk beras, kacang kedelai dan kacang *adzuki*, yang sebelumnya dikirim dari pelabuhan Incheon, sekarang dikirim secara langsung dari pelabuhan-pelabuhan di Seoul, seperti pelabuhan Yongsa, Mapo, dan *Seo-gang*, menuju Jepang dan daerah-daerah tujuan yang lain. Pada waktu itu juga hewan-hewan ternak dari Gangwon-do dan daerah-daerah lain mulai diekspor melalui pasar di sepanjang Sungai *Han*.[53]

---

[52]*Ibid*., hlm. 7-8.

[53]*Ibid.,* hlm. 8-9.